

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta. Sinar Grafik.
- Boedi Harsono. 2013. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya)*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Maria S.W. Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (Edisi Revisi)*. Jakarta. Kompas.
- Mhd Yamin Lubis dan Abd rahim. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi (peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Padan Badan Pertanahan Nasional)*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafik.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Kencana.
- Urip Santoso. 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Kencana.
- , 2017. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Depok. Kencana.
- Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. Jakarta. Sinar Grafik .
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta.

Sinar Grafik.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers

Waskito dan Hadi Purnomo. 2018. *Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang*. Jakarta. Kencana.

### **Karya Ilmiah**

Abdul Muhaimin Rahim Mulsin. 2016. *Alas Hak Pemerintah Dalam Membangun Kantor Pemerintahan Di Atas Tanah Hak Milik Perorangan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Adria Luhur Prakoso. 2016. *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Publikasi Ilmiah UMS. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukoharjo.

Agra Verta Ardi Nugraha. 2015. *Keabsahan Perjanjian Jual beli Tanah Yang Didalamnya Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 178/PDT.G//2012/PN.Sda)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Arief Sumeru. 2016. *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.4, No.1. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Anwar Borahima. 2013. *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah Sementara*. *Rechtidee Journal trunojoyo*. Vol 8, No 1. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo. Madura.

Atanasius Tandirerung. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Pasal 303 dan/atau 303 bis Tentang Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (Ma'Pasilangi Tedong) di Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Bambang Eko Mulyono. 2013. *Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Mutlak Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris*. Jurnal Independent. Vol. 2. Universitas Islam Lamongan.
- Devanda. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi (Studi Putusan No. 1287/pid.B/2014 Pn-Tjk)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Eka Wahyudi. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Menggunakan Merek Palsu*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Firman. 2018. *Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Wni Non Pribumi*. Tesis, Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
- Firstly Markhaputri. 2017. *Penggunaan Girik Sebagai Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Pertama Kali Di Kabupaten Bekasi*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Giovanni Rondonuwu. 2017. *Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. E-Journal Unsrat. Vol 5. No 4. Universitas Sam Ratulangi. Kota Manado.
- Hardian Patria. 2013. *Kedudukan Kepala Desa Dalam Pendaftaran Tanah Karena Pemindahan Hak*. Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara. Vol.1, No.1. Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung. Lampung.
- Ida Ayu Kade Kusumaningrum, I Gusti Ngurah Wairocana, I Dewa Made Suartha. 2017 *Kewajiban Sanksi Instrumen Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol 2. No.2. Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Bali.
- Irwan Adi Cahyadi. 2014. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Irwan Adi Cahyadi. 2014. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum positif Indonesia*. Hukum.Studentjournal. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.

- Joko Sadewo. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan*. Jurnal Berkala Magister Ilmu Hukum. Vol.2, No.2. Universitas Kader Bangsa. Palembang.
- Kadek Poolina Prameswari, Made Gede Subha Karma Resan, Cokrode Dalem Dahana. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir. Jurnal. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Bali
- Kurniawan Herwanto, Nadia Putri Pascawati, Mar Atus Sholiha, Firman Angga, Ardani Retno Nindito, Dofi Yos Hermawan, Amiril Fathoni. 2017. *Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman*. Makalah. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Surabaya.
- Melita Ma'dika Amburura. 2015. *Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Tanah toraja*. Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Miethra Tanjung. 2014. *Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Skripsi. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2011. *Status Kepemilikan Dan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan Hidup Masyarakat Adat*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol.19,N0.4. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ni Nyoman Putri Satrianingsih dan A.A. Ngurah Wirasila. 2019. *Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Dibawah Tangan*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. Vo.7,No.6. Fakultas Hukum Udayana. Badung.
- Noviyanti Wulandari Sitepu. 2020. *Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communication*. Jurnal Ius Civile. Vol 4. No 2. STIE Al Kahiriyah Cilegon Business School. Banten.

- Nuragifah. 2018. *Pendaftaran Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Jual Beli Di Hadapan Kepala Desa*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nur Al Aina. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Dan Gelandangan Disabilitas Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Dinas Sosial Tahun 2013-2018)*. Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nur Hayati. 2016. *Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum tanah Nasional)*. Media Neliti.com. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Nurul Riska Amalia. 2017. *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.
- Prancisca Romana Dwi Hastuti. 2015. *Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait Di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Neliti Repositori Ilmiah Indonesia. Vol.II, No.2. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Rifan Agrisal Ruslan dan Umar Ma'ruf. 2017. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli tanah Dengan akta PPAT Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara*. Jurnal Akta. Vol. 4, No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Rosdalina Bukido. 2009. *Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Vol 7. No 2. Institut Agama Islam (IAIN) Manado.
- Sumaryono. 2009. *Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Urip Santoso. 2012. *Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)*. Prespektif. Vol. XVII No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Air Langga Surabaya.
- Wagirin. Teo Christoper Limbong. 2018. *Aspek Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Jual Beli*

*Di Bawah Tangan*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.1, No.1. Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Medan.

Wicipto Setiadi. Muhammad Arafah Sinjar. Heru Sugiyono. 2019. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Model Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Tanjungsari Kabupaten Bogor. Jurnal Rechts Viding. Vol.8, No.1. Media Pembinaan Hukum Nasional.

Winarto Yudho dan Heri Tjandrasari. 1987. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat". Jurnal Hukum Pembangunan. Vol 17. No 1.

### **Internet**

ANONIM.[http://eprints.undip.ac.id/61009/3/10\\_BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/61009/3/10_BAB_II.pdf).diakses tanggal 25 Juni 2020. pukul 17.04 Wita.

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56 ...](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56...), 2010 - academia.edu,

Shietra and Partners. *Alas Hak Versus Hak Atas Tanah*.  
<https://www.hukum-hukum.com/2016/12/alas-hak-versus-hak-atas-tanah.html#:~:text=Yang%20disebut%20%E2%80%9Chak%20atas%20tanah,tanda%20bukti%20kepemilikan%20yang%20kuat..>  
Diakses Tanggal 29 Juli 2020 Pukul 22:14

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Burgerlinjk Wetboek (BW)